

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi dalam menjalani kehidupan. Untuk mencapainya, individu berusaha dengan bekerja guna memperoleh imbalan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Namun, tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang layak masih menjadi permasalahan yang dihadapi banyak orang. Faktor-faktor seperti keterbatasan lapangan kerja, persaingan yang ketat, serta ketidaksesuaian antara keterampilan dan permintaan pasar tenaga kerja menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya peningkatan keterampilan, pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja baru menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan dalam sektor ekonomi, salah satunya adalah permasalahan pengangguran. Sejatinya tingkat pengangguran yang tinggi akan menurunkan tingkat kesejahteraan dan standar hidup masyarakat (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022). Meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, ketersediaan lapangan kerja masih belum mampu menampung seluruh angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran tertinggi pada 4 tahun terakhir terjadi pada tahun 2021. Berikut terlampir tren perkembangan tingkat pengangguran per Agustus 2024.



**Gambar 1.1 Statistik Tingkat Pengangguran Tahun 2024**

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2024*

Berdasarkan gambar 1.1, jumlah pengangguran pada tahun 2021 mencapai 6,49%, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan dan pada tahun 2024 mencapai 4,92%. Indonesia yang menempati posisi sebagai negara terbesar ke-4 didunia sering mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2024 mencapai 152,11 juta orang, jumlah ini mengalami peningkatan 1,15% dibandingkan tahun 2023 atau sebesar 4,40 juta orang. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan menjadikan persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin sulit. Hal ini mendasari seseorang untuk memperoleh kesempatan yang lebih besar dengan melakukan migrasi keluar pulau atau keluar negeri.

Mobilitas penduduk kegiatan perpindahan penduduk dari satu geografis ke wilayah geografis lainnya. Salah satu faktor pendorong seseorang untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah faktor ekonomi yang mencakup kesempatan kerja yang kecil, jumlah uang yang sedikit, serta tingkat pendidikan yang tidak memadai (Natasya & Sudibia, 2024). Pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa negara atau penggerak perekonomian agar negara dapat memperoleh manfaat dari proses peredaran remitansi yang dihasilkan oleh PMI untuk mendorong kemajuan perekonomian negara (Rahmawati:2021). Keberadaan PMI di luar negeri tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kehidupan keluarga mereka di Indonesia.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi keluarga PMI adalah akses terhadap pendidikan tinggi, khususnya bagi anak-anak mereka. Meskipun pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi yang lebih baik, banyak anak PMI yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi karena keterbatasan finansial. Keterbatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar PMI bekerja di sektor informal atau memiliki penghasilan yang tidak tetap, yang membuat mereka sulit untuk membiayai pendidikan tinggi anak-anak mereka (Prastiwi et al., 2023). Berdasarkan laporan bulanan publikasi data PMI yang dikeluarkan oleh (BP2MI) mengatakan sebanyak 145.962 bekerja disektor Informal dan 126.202 bekerja di sektor formal (Laporan Bulanan BP2MI per November 2024).

Seiring dengan berkembangnya sektor informal dan kebutuhan akan tenaga kerja di luar negeri, jumlah pemberangkatan PMI terus berkembang pesat. Menurut data dari BP2MI, jumlah (PMI) yang bekerja di luar negeri terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan tren yang signifikan dan merupakan salah satu fenomena sosial-ekonomi yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Per November tahun 2020,2021,2022,2023, dan 2024 telah diberangkatkan sebanyak 9.659, 6.733, 28.378, 19.673, dan 21.306 (laporan bulanan BP2MI per November 2020-2024).

**Tabel 1.1 Data Pekerja Migran Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tren</b>
2020 (November)	9.659	
2021 (November)	6.733	Penurunan sebesar 30% dari tahun 2020
2022 (November)	28.378	Mengalami kenaikan sebesar 421% dari tahun 2021
2023 (November)	19.673	Penurunan sebesar 30.68% dari tahun 2022
2024 (November)	21.306	Kenaikan sebesar 8.30% dari tahun 2023

*Sumber: Laporan Bulanan BP2MI per November 2020-2024*

Tingginya tingkat migrasi PMI mengantarkan pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus dengan menjalin kerjasama yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satu negara yang menjadi mitra pendidikan negara Indonesia saat ini adalah Malaysia. Wujud dari kerjasama dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan akses terhadap pemerintah Indonesia untuk

menjalankan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kurikulum pendidikan Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya sekolah Indonesia yang berada di beberapa wilayah di Malaysia seperti Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Sekolah Indonesia Johor Baharu (SIJB), Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan beberapa sekolah lainnya. Sekolah-sekolah tersebut secara khusus didirikan untuk menjadi garda terdepan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 terdapat beberapa daerah yang termasuk dalam kategori daerah khusus guna melaksanakan kebijakan pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Melalui Kedutaan Republik Indonesia (KRI) dan beberapa sekolah Indonesia yang berada di wilayah Malaysia juga menyediakan akses pendidikan melalui program kejar paket A untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), paket B untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket C untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai bentuk pembangunan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia memberikan fasilitas kepada anak-anak pekerja migran Indonesia untuk melanjutkan pendidikan bagi yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), beasiswa tersebut diberi nama Afirmasi Pendidikan Menengah (ADem) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi siswa atau siswi yang telah menempuh pendidikan SMA atau sederajat. Program ini ditujukan untuk memastikan anak-anak pekerja

migran dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala status mereka sebagai anak migran.

Program ADem memberikan akses kepada anak-anak pekerja migran Indonesia untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA, SMK, atau sederajat yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Siswa dan siswi yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia, memperoleh fasilitas tempat tinggal atau asrama, serta diberikan fasilitas guna menunjang kegiatan belajar. Program ADem akan membuka jalan bagi siswa atau siswi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau dunia kerja.

Program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) dirancang untuk memfasilitasi anak-anak PMI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dalam skema ADik, penerima beasiswa akan diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan jenjang pendidikan DIV atau S1 selama 8 semester atau 4 tahun yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahun anggaran 2023, 7.614 mahasiswa asal Papua, Daerah Khusus, atau 3T, serta anak repatriasi atau buruh migran telah menerima beasiswa melalui Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dari pemerintah. Dari total itu, 1.321 siswa (17,35%) berasal dari Papua, Daerah Khusus, dan Repatriasi, dan 3.231 siswa (42,43%) berasal dari Wilayah Papua, tetapi bukan lulusan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADem).

Mahasiswa yang merupakan anak dari PMI memiliki kondisi keuangan yang khas. Hasil observasi menunjukkan bahwa mahasiswa anak pekerja migran Indonesia masih sangat bergantung pada pendapatan yang bersumber dari orang tua yang bekerja di luar negeri. Di satu sisi, mereka mendapatkan remitansi dari orang tua yang bekerja di luar negeri, namun di sisi lain, mereka juga harus mengelola pengeluaran sehari-hari dan kebutuhan lainnya secara mandiri.

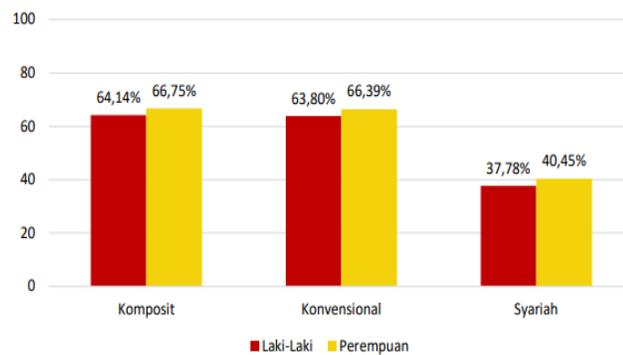
Secara umum remitansi dapat diartikan sebagai pengiriman yang berupa uang atau barang yang ditujukan kepada penerima yang berada di wilayah asalnya. Jumlah penerimaan remitansi yang diterima oleh anak-anak pekerja migran Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status perkawinan, pengalaman kerja, dan jumlah tanggungan keluarga (Natasya & Sudibia, 2024). Di era perkembangan teknologi saat ini, kegiatan penerimaan remitansi dapat dijalankan secara singkat, biaya yang murah, serta terhindar dari ancaman kejahatan melalui transfer bank atau jasa transfer uang lainnya. Situasi global yang semakin terhubung membuat gejolak yang terjadi perekonomian yang terjadi pada suatu negara berdampak pada perekonomian negara lain. Hal ini meningkatkan kemungkinan krisis ekonomi dan keuangan (Yusuf et al., 2023).

Demi mencapai kesejahteraan di masa sekarang dan masa depan, pemahaman dan pelaksanaan mengenai pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan bagi mahasiswa anak PMI (Nabilah & Rosalia, 2023). Pentingnya pemahaman akan pengelolaan keuangan menjadi salah satu fakta bahwa setiap individu saat ini dihadapkan langsung untuk mengelola keuangan dalam kehidupannya.

Keberhasilan individu dalam melakukan pengelolaan keuangan akan mengantar seseorang untuk mampu bertahan dari kondisi kelaparan dan kemiskinan. Sesuai indikator yang tercantum pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), kondisi tanpa kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu point dalam program berkelanjutan oleh suatu negara. Salah satu faktor yang mendasari individu dalam melakukan pengelolaan keuangan adalah literasi keuangan (Napitupulu et al., 2023).

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan mereka sendiri, yang mencakup kemampuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi informasi yang biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan serta memahami akibatnya (Nabilah & Rosalia, 2023). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) individu yang memahami literasi keuangan ditunjukkan dengan kriteria yang “*well literate*”. Kriteria *well literate* akan terpenuhi apabila seseorang memenuhi aspek parameter indeks literasi keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Survei Nasional Literasi dan Indeks Inklusi Keuangan tahun 2024 yang ditampilkan pada gambar 2 menunjukkan hasil indeks berdasarkan golongan usia 18-25 tahun, 26-35 tahun, dan 36-50 tahun memiliki nilai tertinggi dengan masing-masing nilai 70,19%, 74,82%, dan 71,72%. Indeks literasi konvensional sebesar 69,78%, 74,47%, dan 71,31% dan indeks literasi syariah sebesar 42,94%, 50,32%, dan 43,99%. Sebaliknya kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah dengan masing-masing nilai sebesar 51,70%, dan 52,51%, indeks konvensional sebesar 51,50% dan

52,24%, serta indeks literasi syariah sebesar 25,54% dan 26,76%. Salah satu bentuk literasi dalam pengetahuan keuangan adalah dimulai dari lingkungan keluarga (Yusuf et al., 2023). Pendidikan keuangan dalam keluarga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan.



**Gambar 1.2 Tabel Literasi dan Indeks Inklusi Keuangan 2024**

*Sumber: Survei Nasional Literasi dan Indeks Inklusi Keuangan OJK 2024*

Keluarga merupakan garda terdepan pendidikan bagi anak, sehingga peran keluarga sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Sebagai seorang mahasiswa, pendidikan keluarga sangatlah penting untuk didapatkan, terlebih pendidikan mengenai pengelolaan keuangan yang hendaknya diperoleh dan dipraktikkan sejak kecil (Yusuf et al., 2023). Perubahan status dari siswa menuju mahasiswa dan jarak yang jauh dari orang tua menuntut anak pekerja migran Indonesia untuk mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan. Seorang anak yang memiliki teladan dalam pengelolaan keuangan akan mampu mengelola keuangan dengan lebih bijak daripada anak yang tidak memiliki teladan (Nanga & Kotte, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan salah satunya adalah Arifa & Setiyani (2020) yang menyatakan bahwa literasi keuangan, pendapatan, dan pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh terhadap *financial management behavior*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Listiadi (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya mendasari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh literasi keuangan, remitansi, dan pendidikan keuangan di keluarga terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa anak pekerja migran Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa anak pekerja migran Indonesia?
2. Apakah Remitansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa anak pekerja migran indonesia?
3. Apakah Pendidikan Keuangan di Keluarga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa anak pekerja migran indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Literasi Keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa anak pekerja migran Indonesia
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Remitansi terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa anak pekerja migran Indonesia
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pendidikan Keuangan di Keluarga terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa anak pekerja migran Indonesia

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademik dalam bidang keuangan keluarga, pendidikan, dan migrasi. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana literasi keuangan, nominal remitansi, dan pendidikan keuangan di keluarga mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa, khususnya anak pekerja migran Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan yang

bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara faktor keuangan dan pendidikan dalam mendukung kesejahteraan finansial generasi muda di keluarga pekerja migran.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa anak pekerja migran Indonesia, hasil penelitian ini adalah memberikan panduan bagi mahasiswa anak pekerja migran Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mereka.
- b. Bagi pekerja migran Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh keluarga pekerja migran untuk memahami pentingnya literasi keuangan dan pendidikan keuangan di rumah dalam mendukung anak-anak mereka mengelola dana remitansi secara bijak.
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh literasi keuangan, nominal remitansi, dan pendidikan keuangan di keluarga terhadap pengelolaan keuangan